

BAB III

**KONSTELASI DALAM NEGERI DAN MOTIVASI SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO DALAM MENGEMBANGKAN
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Dinamika politik dalam negeri Indonesia pasca reformasi menunjukkan perkembangan yang progresif ke arah demokratisasi. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Indonesia ke-6 ternyata berhasil membawa pengaruh positif bagi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Ini ditandai dengan meningkatnya kunjungan kenegaraan dan kontrak kerjasama pada kedua negara.

Pencapaian kerjasama bilateral Indonesia dan Australia pada era SBY ternyata dipengaruhi oleh karakteristik personal (individunya) yang berupaya mengambil momentum untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia atas Australia. Kemudian faktor selanjutnya yang berhasil mempengaruhi kerjasama bilateral kedua negara tersebut adalah dinamika politik dalam negeri Indonesia, dimana masalah ekonomi yaitu pembangunan dan keamanan terkait dengan terorisme masih menjadi motivasi yang kuat, dimana ini kemudian mendapatkan dukungan atau legitimasi dari para pemangku kepentingan, diantaranya parlemen hingga kabinet. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab III sebagai berikut.

A. Biografi Susilo Bambang Yudhoyono dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Keberadaan seorang pemimpin mampu memberikan pengaruh yang kuat bagi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan pada proposisi berbagai tokoh politik klasik dan kontemporer, diantaranya Schumpeter hingga Guilermo O. Donell menunjukkan bahwa kapabilitas pemimpin (*top person*) menjadi tolok ukur bagi arah politik luar negeri suatu negara, baik pada kelompok negara demokratis terlebih lagi model negara otoritarianis. Kemudian terdapat faktor penting bagi pemimpin suatu negara yaitu berkaitan dengan aspek manipulasi kolektif dan personal.

Keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia ternyata memiliki pengaruh yang kuat bagi pembuatan kebijakan luar negeri. Jika melihat pada rekam jejak (*track record*) dan biografi maka presiden ke-enam Indonesia ini mampu mewakili figur militer sekaligus sipil. Ini disebabkan Yudhoyono merupakan elit militer yang berasal dari lulusan terbaik Akademi Militer dan sepanjang karirnya berhasil meraih jenjang kepangkatan perwira tinggi. Kemudian dalam jenjang non-militer Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil dipercaya mengemban jabatan menteri hingga merintis salah satu partai mayor di Indonesia, yaitu Partai Demokrat.

Karakter personalitas SBY kemudian berhasil menjadi pengaruh yang kuat bagi kebijakan politik luar negeri. Dalam kepemimpinannya SBY berhasil mengemukakan konsepnya yang dikenal dengan “Million Friend Zero Enemy” atau Sejuta Teman dan Tanpa Musuh. Gagasan ini pertama kali dimunculkan SBY pada

pelantikan presiden tahun 2009 bersama wakil presiden Budiono di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Makna penting dari konsep ini adalah bagaimana Indonesia dapat menampilkan diri dalam konstelasi politik internasional yang bergejolak dengan membangun kerjasama dengan berbagai negara di berbagai penjuru (*all direction foreign policy*). (Djalal, 2009:107)

Dalam gagasan “Million Friend Zero Enemy” arah politik luar negeri dijalankan dengan mengedepankan aspek perolehan yang juga dapat disebut sebagai pragmatisme kebijakan luar negeri. Dalam pernyataannya SBY mengemukakan bahwa :

“...mari kita bersama-sama membangun citra positif Indonesia di mata internasional, selama ini Indonesia terjebak dengan dikotomi barat dan timur, hingga oposisi terhadap negara-negara Islam yang lainnya. Untuk itu, perlu sekiranya Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri tanpa mengaitkannya dengan masalah politik, latar belakang sejarah dan lain-lainnya, namun tetap mengedepankan kerangka pencapaian kepentingan nasional.”

Dengan demikian jika dikaitkan dengan kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2009 maka ini tidak lepas dari figur SBY. Sedangkan kebijakan SBY bukan didasarkan pada euforia, namun dilatarbelakangi oleh figur pribadi atau personalitas yang berkaitan era dengan bibliografi, serta berbagai karir dan pencapaian prestasi yang dilaluinya.

1. Biografi Biografi Susilo Bambang Yudhoyono

Keberadaan pemimpin suatu negara, baik presiden raja ataupun perdana menteri memiliki peranan penting dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara. Hal ini bisa terjadi pada kelompok negara demokrasi baru terlebih lagi pada negara monarki absolut. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan di Indonesia maka keberadaan presiden memiliki peranan penting sebagai simbol negara (*top person*) sekaligus fasilitator dan pelaksana kebijakan luar negeri.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden Republik Indonesia ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo. Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. (Djalal, 2008:29)

Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertama kali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota

Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).(viva.co.id)

SBY juga pernah masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, beliau meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. (viva.co.id)

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad

(Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

Dalam perkembangannya SBY kemudian dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).(aljazeera.com)

Dalam karir militernya SBY juga seringkali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi gencatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua

Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999). (aljazeera.com)

2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Secara keseluruhan, banyak pihak memberikan penilaian pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY (2004-2014) mengalami peningkatan dan perkembangan cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai “prestasi” yang dicapai dalam forum regional maupun global. Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, secara umum SBY menjalankan kebijakan luar negeri dalam tiga program utama. *Pertama*, pemanfaatan politik luar negeri dalam konteks optimalisasi diplomasi. *Kedua*, peningkatan kerjasama multilateral dalam rangka meraih beragam peluang internasional. *Ketiga*, penegasan komitmen perdamaian dunia dalam rangka turut serta menjaga ketertiban dunia dalam berbagai persoalan keamanan internasional.(interseksi.org)

Dalam konteks kerjasama regional, misalnya, pemerintah SBY telah memperlihatkan komitmennya untuk senantiasa berkontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 dan memastikan kawasan Asia Tenggara tetap dalam keadaan damai sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Treaty of Amity and Cooperation*. Masih dalam konteks kerjasama regional, Indonesia kembali memperlihatkan perannya dalam pembahasan pembentukan tatanan kawasan (*regional architecture building*) dengan ASEAN sebagai penggerak utama (ASEAN

as a driving force) dan dilakukannya penambahan keanggotaan *East Asia Summit* dengan diterimanya Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan.

Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disebut SBY naik pertama kali menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2004. Kemudian pada pemilu tahun 2009, beliau kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden RI. Dalam seminar yang bertajuk ‘Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi di negara-negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa SBY mendapat keuntungan karena kondisi ekonomi dan politik saat ia terpilih sudah cenderung stabil.

Dalam masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kepesatan dan menjadi sorotan di mata internasional. Dalam konteks regionalisme, Indonesia telah menjadi salah satu bukti kebangkitan negara-negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011 lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang menjembatani kepentingan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis utang luar negeri. Kemudian secara spesifik SBY menyatakan arti penting Australia sebagai mitra kerjasama Indonesia bahwa :

“...pemerintah Indonesia tidak akan terkungkung hanya dengan satu atau dua negara saja atau satu atau dua organisasi internasional saja, namun Indonesia akan mengedepankan pragmatisme untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk itu, Australia menjadi salah satu negarapenting untuk bersama-sama mencapai kepentingan nasional. Adanya bantu sandungan dan persoalan-persoalan lainnya akan diselesaikan secara proporsional demi kehormatan bangsa.”(Kompas, 7 Oktober 2006)

Pendekatan politik luar negeri Indonesia terhadap Australia yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
- b. Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

- d. Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan pertimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
- e. Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.
- f. Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin setiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan.

Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan *All Directions Foreign Policy* (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham *A Million Friends, Zero Enemy* yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan-harapan terhadap politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem *bridge builder*, *consensus builder* dan *resolusi conflict*. Dapat dilihat dari penjabaran di atas, bahwa di bawah kepemimpinan SBY politik luar negeri Indonesia kembali tampil *high profile* tetapi konsisten.

B. Dinamika Politik Dalam Negeri Indonesia

Kebijakan ekonomi menjadi salah satu prioritas penting bagi kepemimpinan SBY. Hal ini penting karena pada masa kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkembang rata-rata hanya 2-3 persen pertahun. Selain itu, perdagangan luar negeri Indonesia cenderung berkembang secara statis dengan beberapa mitra kerjasama yang telah ada sebagaimana rezim sebelumnya (rezim Megawati), diantaranya Jepang, China, Amerika Serikat, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya.

Pada periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan SBY, pemerintah terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010, yaitu: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, Memperkuat pilar-pilar demokrasi, Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang,

Pada dasarnya terdapat lima ciri khas bagi kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan SBY masing-masing yaitu :

1. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.

2. Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homoikonomikus tetapi juga social man and religious man, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
3. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial.
4. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
5. Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negatif.

Pada awal pemerintahannya, muncul tantangan dalam bidang ekonomi yaitu perlemahan ekonomi global akibat krisis finansial. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran akan semakin sulit akibat terjadinya krisis ekonomi global tersebut. Namun, pada akhirnya kinerja ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengurangi dampaknya dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri. Di bidang ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dimasukkan

dalam program aksi, diantaranya adalah Program aksi penanggulangan kemiskinan, Program aksi penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan-kebijakan lain yang tentunya sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Dinamika politik dalam negeri menjadi salah satu pertimbangan penting bagi implementasi kerjasama luar negeri. Kemudian jika dikaitkan dengan posisi Australia maka negara ini sebenarnya dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kepentingan nasional karena ini berkaitan dengan beberapa isu yang berkembang di Indonesia, diantaranya keamanan, isu imigran ilegal dan HAM, serta pembangunan berkelanjutan. Faktor-faktor ini ternyata berkaitan erat dengan pencapaian kerjasama bidang perekonomian dalam jangka panjang bagi kedua negara.

1. Isu Keamanan

Kerjasama Pemerintah Australia dengan Indonesia dalam penanganan kasus terorisme ternyata membawa dampak positif bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga anti teroris Indonesia. Dukungan Pemerintah Australia terhadap Indonesia antara lain dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang kompleks antara lain banyak wisatawan manca negara yang menjadi korban pada beberapa kasus peledakan bom di Indonesia, kontak kerjasama perdagangan yang strategis serta alasan-alasan lainnya.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia, ternyata juga berdampak pada semakin meningkatnya skill dan kemampuan lembaga anti teror Indonesia, hal ini berdasar pada fakta bahwa sebelumnya Kepolisian Indonesia mengalami berbagai

kendala dalam kinerjanya yang berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana yang relatif minim dan kemampuan yang terbatas, melalui kerjasamanya dengan Australia banyak dihasilkan berbagai transfer ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk terorisme yang sangat mendukung kinerja aparat kedua negara diantaranya adalah PLATINA.

PLATINA (*Pusat Pelatihan Antiteror Internasional*) merupakan lembaga penanganan anti teror negara-negara Asia-Pasifik, sebelumnya negara-negara Asia-Pasifik tidak mempunyai lembaga penanganan anti teror karena pusat anti terorisme hanya terdapat pada Pusat Pelatihan Anti Terorisme Asia di Bangkok Thailand. PLATINA merupakan pusat pelatihan anti teroris internasional satu-satunya di Kawasan Asia-Pasifik yang mempunyai sarana-prasarana anti terorisme standar internasional.

PLATINA merupakan lembaga anti teroris internasional yang terletak di Semarang Jawa Tengah, lokasinya tergabung dalam kompleks Bumi Bhayangkara Akademi Kepolisian. PLATINA diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli 2004. Pada gelombang angkatan pertama pusat pendidikan ini diikuti perwakilan negara-negara Asia-Pasifik antara lain seluruh negara ASEAN, RRC, Fiji, Vanuatu, Timor Leste, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

PLATINA sebagai pusat pelatihan anti terorisme internasional dilengkapi dengan peralatan canggih, termasuk didalamnya simulasi pembajakan pesawat Boeing dan kereta api. Staf pengajar dari lembaga ini merupakan gabungan dari instruktur negara-negara Asia-Pasifik, termasuk didalamnya dari Amerika Serikat dan Inggris. Sejak dibentuk pada tahun 2004 PLATINA tetap memiliki peranan penting

bagi kerjasama Australia dan Indonesia. Pada periode 2009-2015 keberadaan pusat pelatihan anti teroris internasional masih tetap relevan karena untuk mendukung penanganan EFTF yang terjadi di Indonesia diperlukan wadah kerjasama teknis dan komunikasi bersama. (Tempo, Juli 2004)

Dalam sepanjang periode 2009 hingga 2015 pemerintah Australia telah berhasil mengirimkan personel dan staf pengajarnya ke PLATINA sebanyak tiga kali, masing-masing pada bulan Juli 2009 untuk bersama-sama memfungsikan pengamanan sistem obyek vital, bulan November 2012 untuk bekerjasama dalam teknik demolisi dan penjinakan bahan peledak dan Maret 2013 yang berhasil membahas joint investigation and preventive tactical. (Maneka Tunggal Dharma,2013:28-29)

Dukungan pemerintah Australia selanjutnya terhadap Indonesia adalah program pengembangan JCLEC (*Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation*) didirikan pada Februari 2004 atas prakarsa pemerintah Indonesia dan Australia. Keberadaan JCLEC (*Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperations*) pada dasarnya hampir sama dengan PLATINA. Lembaga ini difungsikan sebagai media dalam mendukung sistem informasi dan telekomunikasi negara-negara Asia-Pasifik dalam rangka menangani ancaman terorisme. JCLEC akan bekerjasama dengan SEARCCT (*South East Asian Regional Centre For Counter Terrorism*) yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan juga dengan ILEA (*International Law Enforcement Academy*) di Bangkok, Thailand. Peran JCLEC menjadi penting karena didalamnya terdapat berbagai aspek dalam hal penanganan masalah-masalah lintas batas (transnasional), mencakup pencucian uang, penyelundupan senjata, pengiriman

data rahasia dan aspek lainnya. JCLEC menyediakan fasilitas pelatihan personel kepolisian untuk mengungkap dan mengantisipasi ancaman terorisme. Adapun tujuan JCLEC dalam jangka panjang adalah berusaha meningkatkan kapasitas perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelidikan kejahatan transnasional dan kasus-kasus terorisme di kawasan Asia-Pasifik yang dilakukan dengan :

- a. Memperkuat hukum dan perundang-undangan sebagai sarana guna memerangi terorisme dan kejahatan transnasional.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan penyelidikan tentang kasus-kasus terorisme.
- c. Meningkatkan Skill dan kemampuan para intelijen.

2. Isu Imigran Ilegal dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Masalah penyelundupan imigran gelap di Indonesia, khususnya Jabar seakan tidak ada henti-hentinya. Ratusan bahkan ribuan imigran gelap asal negara-negara yang tengah berkonflik, hampir setiap saat mencoba menyeberang melalui sejumlah titik di pesisir pantai selatan Jabar menuju Christmas Island, Australia. Australia sendiri memang menjadi negara impian para pencari suaka. Karena Negeri Kangguru tersebut memiliki UU Perlindungan Suaka, sehingga para pencari suara mempunyai harapan untuk membangun kehidupan baru. Sedangkan Indonesia hanyalah tempat transit karena negara ini belum meratifikasi Konvensi Pencari Suaka Tahun 1951.

Berdasarkan data Human Right Watch (HRW), hingga Juni 2013 lalu, terdapat 9.226 imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, sebanyak 2.000 orang

di antaranya adalah anak-anak. Jumlah ini diperkirakan meningkat hingga 2.000% dibanding 2008 silam. Hal tersebut sebagai dampak dari konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara, seperti Afghanistan, Iran, Irak, dan negara Timur Tengah lainnya, juga dari Asia seperti Sri Langka dan Burma. Sebagian besar mereka masuk secara ilegal melalui jalur laut untuk dapat menyeberang ke Australia demi mencari suaka.

3. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia merupakan mitra ekonomi dan regional yang signifikan bagi Australia. Dua arah perdagangan barang dan jasa mencapai \$ 14900000000 pada tahun 2013, dan membuat Indonesia menjadi 12 mitra dagang terbesar dan pasar ekspor terbesar ke-11 bagi Australia. Pada tahun 2013 Investasi Australia di Indonesia bernilai sekitar \$ 10,9 miliar. *Austrade* memperkirakan bahwa ada lebih dari 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia, termasuk sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, infrastruktur, keuangan, kesehatan, makanan dan minuman dan transportasi.

CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) negosiasi yang pada dasarnya akan lebih berkonsentrasi pada sektor jasa ini dimulai di Jakarta pada September 2012. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas hubungan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Perundingan ini akan membawa dua ekonomi terbesar di kawasan ini lebih dekat sehingga akan membentuk bagian penting dari integrasi ekonomi regional Australia sebagai bagian dari Abad Asia.

Indonesia dan Australia telah memulai kerjasama yang lebih erat untuk mencari solusi atas tantangan dan keamanan nasional. Kedua negara tersebut membuat keputusan dalam meningkatkan kelangsungan kepentingan umum yang menyatakan pada "Pernyataan Bersama Maret 2010" untuk meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral. Negosiasi mencakup kerjasama ekonomi (*economic cooperation*), perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*) dan investasi (*investment*) yang akan memberikan kontribusi lebih terhadap bidang ekonomi kedua Negara yaitu Australia dan Indonesia.

Kemudian beberapa program lainnya yang menjadi tolok ukur kemajuan hubungan Indonesia dan Australia pada era kepemimpinan Presiden SBY diantaranya:

- a. Program PRISMA yaitu program mendukung tujuan AIP-Rural dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan sebanyak 30% atau lebih pendapatan bersih untuk 300.000 petani miskin, baik laki-laki maupun perempuan, di perdesaan kawasan Indonesia timur.
- b. Program peduli (*Care Programe*) yaitu program yang membantu upaya-upaya pemberantasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia bermitra dengan organisasi-organisasi masyarakat madani untuk memastikan masyarakat yang disisihkan dan dipinggirkan secara sosial mendapat manfaat dari layanan publik dan peluang-peluang ekonomi.

- c. Direct Assistance Programe (DAP) yaitu skema hibah kecil fleksibel yang didanai oleh Pemerintah Australia dan dikelola oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
- d. Australian Indonesia Program of Justice (AIPJ) yaitu program berupaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlangsung secara inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Lembaga yang bertanggungjawab, layanan yang mudah diakses serta masyarakat madani yang aktif adalah esensial untuk tata kelola pemerintahan yang adil dan efektif serta perlindungan warga yang rentan.(Indonesia-embassy.gov.au)

C. Dukungan Dari Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pemangku kepentingan memiliki peranan penting dalam menentukan implementasi kebijakan dan kerjasama luar negeri Indonesia. Keberadaan parlemen dan kabinet merupakan aktor penting dalam kerjasama Indonesia dan Australia karena dinamika politik yang di dominasi oleh partai pengusung (Partai Demokrat) ini akan memberikan kontribusi yang kuat bagi SBY untuk membangun kerjasama dengan Australia.

Parlemen adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi menjalankan kekuasaan legislatif, yakni membuat kebijakan. Di Indonesia, parlemen ini yaitu DPR. Sedangkan kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau berlevel tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau

Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober 2009 bersama Wakil Presiden Boediono diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian pada tanggal 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang diberi nama “Kabinet Indonesia Bersatu II”. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.(partai.imfo)

Kemudian dalam bidang legislatif (DPR), Partai Demokrat berhasil memenangkan jumlah suara yang signifikan yaitu 20,59% suara atau 150 kursi. Pada prinsipnya DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1). Kemudian setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal 20 ayat (2).

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa politik dalam negeri Indonesia ternyata tidak terlepas dari dinamika ekonomi-politik dan keamanan yang berkembang di Indonesia. Faktor ini kemudian menjadi isu yang mempengaruhi agregasi kebijakan yang kemudian menjadi pertimbangan penting bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori pembuatan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William de Coplin seperti yang ada

pada bab pendahuluan (bab I) maka implementasi kerjasama luar negeri ternyata harus mempertimbangkan dinamika perekonomian dan keamanan Indonesia.

Orientasi SBY terhadap Australia pada bidang keamanan adalah penanganan terorisme untuk membangun stabilitas dalam negeri Indonesia. Nantinya upaya ini akan menjadi prasyarat agar pembangunan dan kerjasama ekonomi-perdagangan dapat berjalan secara optimal. Hal ini penting mengingat Australia pernah mengalami sejarah buruk di Indonesia, berkaitan dengan aksi teror, diantaranya kasus bom bali I, II, kedutaan besar dan kasus-kasus lainnya. Kemudian motivasi selanjutnya bagi SBY dalam mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia juga dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dan kapasitas Australia sebagai negara maju. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab IV).